

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran konstitusi dalam penyelesaian konflik di Suriah

Menunjukkan bahwa konstitusi belum mampu berjalan secara efektif sebagai instrumen penyelesaian konflik masyarakat. Sebelum pembaharuan Konstitusi Tahun 2012, Suriah menggunakan Konstitusi Tahun 1973 yang memberikan dominasi kekuasaan sangat besar kepada presiden dan Partai Ba'ath melalui Pasal 8. Kondisi tersebut menyebabkan lemahnya penerapan prinsip demokrasi, checks and balances, serta terbatasnya partisipasi politik masyarakat. Setelah munculnya konflik tahun 2011, pemerintah melakukan reformasi melalui Konstitusi Suriah Tahun 2012 dengan menghapus dominasi Partai Ba'ath dan memperkenalkan prinsip demokrasi serta perlindungan hak warga negara. Akan tetapi, dalam praktiknya negara tetap lebih banyak menggunakan pendekatan keamanan dan militer dibandingkan penyelesaian konflik melalui mekanisme konstitusional dan dialog politik. Dominasi kekuasaan eksekutif serta lemahnya pelaksanaan supremasi konstitusi menyebabkan konflik di Suriah berlangsung berkepanjangan dan sulit diselesaikan secara damai.

2. Peran konstitusi dalam penyelesaian konflik di Kazakhstan

Menunjukkan bahwa konstitusi memiliki fungsi yang lebih adaptif dalam merespons konflik masyarakat. Setelah kemerdekaan dari Uni Soviet, Kazakhstan menggunakan Konstitusi Tahun 1993 yang kemudian diperbaharui melalui Konstitusi Tahun 1995 untuk menciptakan stabilitas politik dan pemerintahan yang lebih efektif. Meskipun sistem pemerintahan Kazakhstan juga menunjukkan dominasi kekuasaan presiden, negara tidak hanya menggunakan pendekatan keamanan dalam menghadapi konflik masyarakat, khususnya konflik Januari 2022, tetapi juga melakukan reformasi konstitusi sebagai bentuk respons terhadap

tuntutan masyarakat. Reformasi konstitusi tahun 2022 dilakukan melalui referendum nasional dengan tujuan memperkuat demokrasi, meningkatkan fungsi parlemen, mengurangi dominasi presiden, dan memperluas partisipasi politik masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa konstitusi di Kazakhstan digunakan sebagai instrumen hukum dan kelembagaan negara dalam menjaga stabilitas nasional serta menyelesaikan konflik melalui reformasi ketatanegaraan.

3. Perbandingan peran konstitusi dan negara dalam penyelesaian konflik di Suriah dan Kazakhstan

Menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan dalam implementasinya. Persamaannya, kedua negara sama-sama memiliki sistem pemerintahan presidensial dengan dominasi kekuasaan eksekutif yang kuat serta menggunakan pendekatan keamanan untuk menjaga stabilitas nasional ketika konflik terjadi. Namun, perbedaannya terletak pada cara negara menggunakan konstitusi dalam menyelesaikan konflik masyarakat. Suriah lebih menitikberatkan pada pendekatan represif dan penggunaan kekuatan militer sehingga konstitusi belum mampu berfungsi secara optimal sebagai instrumen penyelesaian konflik. Sebaliknya, Kazakhstan menunjukkan pendekatan yang lebih adaptif melalui reformasi konstitusi dan pembaruan kelembagaan negara sebagai upaya merespons tuntutan masyarakat dan memperkuat sistem demokrasi. Dengan demikian, efektivitas konstitusi dalam penyelesaian konflik sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan prinsip negara hukum, supremasi konstitusi, pembatasan kekuasaan negara, serta komitmen pemerintah dalam menjalankan reformasi politik secara demokratis.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Perbandingan Peran Konstitusi dan Negara dalam Penyelesaian Konflik di Suriah dan Kazakhstan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan secara akademis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Suriah, penyelesaian konflik secara berkelanjutan tidak hanya dapat dilakukan melalui pendekatan keamanan dan militer, tetapi juga harus diiringi dengan penguatan pelaksanaan konstitusi secara demokratis. Pemerintah perlu memperkuat prinsip supremasi konstitusi, menjamin perlindungan hak asasi manusia, memperluas partisipasi politik masyarakat, serta membangun mekanisme checks and balances yang lebih efektif agar konstitusi dapat berfungsi sebagai instrumen penyelesaian konflik dan penjaga stabilitas negara.
2. Bagi Pemerintah Kazakhstan, reformasi konstitusi yang telah dilakukan pasca konflik Januari 2022 perlu dilaksanakan secara konsisten dalam praktik ketatanegaraan. Pemerintah perlu memastikan bahwa pembatasan kekuasaan presiden, penguatan fungsi parlemen, dan perlindungan hak-hak masyarakat benar-benar diterapkan secara nyata agar reformasi konstitusi tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mampu memperkuat demokrasi dan mencegah munculnya konflik sosial di masa mendatang.
3. Bagi kedua negara, penyelesaian konflik masyarakat sebaiknya lebih mengedepankan pendekatan konstitusional, dialog politik, dan perlindungan hak warga negara dibandingkan penggunaan pendekatan represif semata. Konstitusi harus dijadikan sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan kekuasaan negara agar tercipta stabilitas nasional yang sejalan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi.
4. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam kajian hukum tata negara, khususnya mengenai peran konstitusi dalam penyelesaian konflik masyarakat. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan pembahasan secara lebih luas, misalnya mengenai efektivitas reformasi konstitusi, peran lembaga negara, maupun pengaruh hukum internasional dalam penyelesaian konflik di berbagai negara.